UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Berdasarkan Pasal 29 UU No.10 Tahun 1998 Dalam Pemberian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Subsidi Pada PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Kota Pekanbaru dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan perkreditan, dilanjutkan dengan proses pemberian putusan kredit (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian putusan kredit), penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan pembinaan kredit.
2. Faktor-Faktor Penyebab Prinsip Kehati-Hatian Berdasarkan Pasal 29 UU No.10 Tahun 1998 Dalam Pemberian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Subsidi Pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Kota Pekanbaru Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal berasal dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak Bank BTN dan faktor eksternal berasal dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak nasabah baik yang disengaja atau pun tidak. Faktor-faktor eksternal tersebut lebih banyak menyangkut kondisi ekonomi, industri, pasar, dan regulasi pemerintah.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja Bank BTN Cabang Pekanbaru yang berdasar atas prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 29 UU No.10 Tahun 1998 dalam pemberian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Subsidi maka diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap pedoman pelaksanaan pemberian putusan kredit yang memuat prosedur-prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bank BTN juga harus memperbaiki manajemen kredit dan pengelolaan kualitas kredit, seperti merubah suku bunga *Floating* menjadi suku bunga *Flat* dan seleksi lebih baik lagi nasabah yang akan menerima kredit KPR Subsidi sehingga akan lebih hati-hati dalam menyalurkan KPR kepada nasabah, terutama nasabah yang berwirausaha. Rumah tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, dengan kebutuhan perumahan yang besar, maka hal ini merupakan prospek yang menjanjikan.
2. Harus tersedianya formulir dan dokumen yang memadai dan dibuat pada saat terjadinya transaksi dan disusun sedemikian rupa sehingga mendorong persiapan secara tepat serta menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Adanya pengamanan fisik atas dokumen-dokumen yang penting yang berhubungan dengan kredit maupun dari staf bagian kredit serta adanya regulasi dari pemerintah yang dapat membantu untuk mengatasi faktor-faktor penyebab prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 29 UU No.10 Tahun 1998 dalam pemberian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Kota Pekanbaru tidak dapat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilaksanakan secara optimal. Semakin banyak kredit yang disalurkan bank BTN Cabang Pekanbaru berarti akan terjadi peningkatan pembangunan diberbagai sektor, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah, dengan demikian pemerintah dapat membuka kesempatan kerja serta meningkatkan jumlah barang dan jasa. Kemudian untuk menekan kredit macet Bank BTN harus merestrukturisasi beberapa nasabah yang memungkinkan punya pendapatan dan jangka waktu pelunasan untuk diperpanjang waktu kreditnya dan diberikan penurunan bunga kredit.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.